

STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Nindy Pratiwi
NPP.30.0570

Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : pratiwinindy1@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Muslim, A.P., S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Bogor District is one of the districts that has a high risk index for landslides. Bogor Regency ranks 19th out of 26 regencies/cities in West Java. The vulnerability of the soil characterized by weathered rocks and soil that are easily eroded if water seeps continuously makes Bogor Regency vulnerable to landslides. **Purpose:** to find out the strategy of BPBD Bogor Regency in reducing the risk of landslides and to find out the inhibiting factors of BPBD in reducing the risk of landslides. **Method:** The author used qualitative research design with descriptive method and inductive approach. Sources of research data were obtained through primary data, namely interviews with ASN BPBD Bogor Regency, observation of activities and documentation. Secondary data was obtained from legalized or published documents related to the research. The research results were obtained through data reduction, data presentation, and conclusion drawing combined with SWOT analysis. **Result:** Based on the results of the research, the author concludes that BPBD's strategy in disaster risk reduction landslides good. This is supported by Bogor Regency APBD funds, a good work system and adequate facilities and infrastructure. Factors that hinder efforts to reduce the risk of landslides are the size of the area, limited apparatus resources and there are still many people who build buildings that are not in accordance with the rules. **Conclusion:** Landslide risk level is influenced by the level of hazard, vulnerability and capacity. Capacity must be maximized in order to reduce the risk level of landslides.

Keywords: Strategy, Disaster Risk Reduction, Landslide

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten yang memiliki indeks risiko tinggi terhadap ancaman tanah longsor. Kabupaten Bogor menempati posisi ke-19 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Kerentanan tanah dengan ciri batuan dan tanah yang lapuk sehingga mudah tergerus jika air meresap secara terus-menerus membuat Kabupaten Bogor rentan akan terjadinya tanah longsor. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui strategi dari BPBD Kabupaten Bogor dalam pengurangan risiko

bencana tanah longsor serta mengetahui faktor penghambat BPBD dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor. **Metode:** Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sumber data penelitian diperoleh melalui data primer yaitu wawancara dengan ASN BPBD Kabupaten Bogor, observasi kegiatan dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang telah disahkan atau dipublikasikan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dipadukan dengan analisis SWOT. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, bahwa strategi BPBD dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor sudah baik. Hal ini didukung oleh dana APBD Kabupaten Bogor, sistem kerja yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai. Faktor yang menghambat dalam upaya pengurangan risiko tanah longsor ialah luas wilayah, terbatasnya sumber daya aparatur dan masih banyak oknum yang membangun bangunan tidak sesuai dengan aturan. **Kesimpulan:** Tingkat risiko bencana tanah longsor dipengaruhi oleh tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas. Kapasitas harus dimaksimalkan agar penurunan tingkat risiko bencana tanah longsor bisa teratasi dengan baik.

Kata Kunci: Strategi, Pengurangan Risiko Bencana, Tanah Longsor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara kepulauan yang dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga menimbulkan dampak positif serta negatif. Dampak positifnya yakni Indonesia mempunyai sumber daya melimpah serta menjadi negara strategis dalam perekonomian dunia. Namun disisi lain terdapat dampak negatif yang ditimbulkan yaitu Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi bencana alam tertinggi. Berdasarkan letak geografis, geologis, hidrologis dan demografisnya Indonesia ialah negara kepulauan yang terletak pada posisi rawan bencana yang biasanya disebut dengan supermarket bencana serta daerah sabuk api atau "*Ring Of Fire*". Indonesia berada diantara pertemuan tiga lempeng dunia yakni lempeng IndoAustralia, Eurasia, serta Pasifik yang mengakibatkan posisi Indonesia mudah bergeser serta rawan bencana longsor, gempa bumi, dan tsunami.

Tanah longsor dapat terjadi karena dampak yang ditimbulkan dari alam dan dari manusia. Faktor alam terjadi alami tanpa campur tangan manusia yang diakibatkan oleh curah hujan ekstrim secara terus menerus ditambah dengan kondisi lereng terjal dan curam tanpa adanya pohon yang besar serta akar yang kokoh untuk menopang permukaan tanah atau batuan disekitar lereng tersebut. Selain itu terdapat faktor manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup pihak lain. Tanah longsor yang diakibatkan oleh manusia itu seperti intensitas penggunaan serta perawatan lahan, kepadatan penduduk, dan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana karena topografinya yang sangat beragam yaitu disebelah selatan terdiri atas daerah bukit dengan sedikit pantai, sebelah utara terdiri atas dataran rendah, dan sebelah tengah terdiri

atas dataran tinggi bergunung. Serta berada pada jalur Circum Pacific dan mediteran, yang menyebabkan daerah ini termasuk daerah labil yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta rawan terjadi gempa Bumi.

Jawa Barat memiliki 9 kota dan 18 Kabupaten yang salah satunya ialah Kabupaten Bogor yang terdiri atas 40 Kecamatan, 19 kelurahan serta 419 Desa. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Bogor yakni antara 6°18'0"-6°47'10" LS 106°23'45"-107°13'30" BT. Topografi Kabupaten Bogor sangatlah beragam mulai dari landai hingga bukit terjal. Daerah daratan memiliki bentuk morfologi dengan kemiringan lereng sekitar 0-5%, serta ketinggian wilayah mulai dari 125 meter hingga 175 dpl. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat kejadian bencana di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 terhitung ada 1.122 kasus dengan bencana yang paling banyak terjadi yaitu tanah longsor dengan 514 kasus.

Kerentanan tanah dengan ciri batuan dan tanah yang lapuk sehingga mudah tergerus jika air meresap secara kontinu membuat Kabupaten Bogor rentan akan terjadinya tanah longsor. Selain itu, adanya aktivitas manusia juga menambah kerentanan terjadinya tanah longsor seperti aktivitas pembangunan yang tidak semestinya. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor pada tahun 2017 di tiga kecamatan (Ciawi, Cisarua dan Megamendung) yang masuk kawasan Puncak ditemukan sedikitnya 73.000 bangunan belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB). Derasnya pembangunan villa dan perumahan membuat hutan lindung yang ada di kawasan Puncak hilang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 dijelaskan bahwa area yang masuk zona N1 alias non-budidaya, yang antara lain berupa hutan lindung, daerah resapan air, dan kawasan dengan kemiringan tertentu. Kawasan seperti ini mesti dipertahankan dan sama sekali tidak boleh dijadikan wilayah hunian, tempat peristirahatan, apalagi lokasi kegiatan bisnis.

Tingginya potensi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor mengharuskan dibuatnya strategi yang efektif sebagai langkah antisipasi meminimalisir risiko potensi tanah longsor. Berdasarkan pertimbangan tersebut melakukan penelitian yang berjudul : **“Strategi Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor yaitu didasarkan karena faktor luas wilayah, terbatasnya sumber daya aparatur serta masih banyak pihak asing yang membangun bangunan tidak sesuai dengan aturan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Penelitian Juhadi, Wahyu Setyaningsih, Nia Kurniasari (2016) dengan judul Pola Perilaku Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perilaku masyarakat dalam pengurangan resiko bencana tanah longsor di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan pola perilaku masyarakat di wilayah penelitian tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor. Sikap dan pengetahuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana tanah longsor cukup baik, namun belum tercermin di dalam pola perilakunya. Pola perilaku masyarakat setempat dalam upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor masih rendah. Penelitian terdahulu lainnya yaitu penelitian Filza Ridwan Roshan (2021) dengan judul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mengantisipasi Bencana Alam Hidrometeorologi di Kota Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya melakukan strategi pengantisipasi bencana alam hidrometeorologi secara cepat tanggap berdasarkan konsep pentahelix, yaitu kegiatan dalam rangka manajemen kebencanaan dimana paradigma penanganan bencana yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melainkan melibatkan semua unsur yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa, sehingga terjadi sinergitas dan kerjasama yang baik

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni teori strategi Rangkuti (2017) dengan beberapa indikator yaitu *streght*, *weakness*, *opportunities*, *threats*.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada pengurangan risiko bencana tanah longsor. Pendekatan induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas akan lebih mengecil atau lebih spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

Tingkat risiko tanah longsor diperoleh dari tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas tanah longsor di Kabupaten Bogor. Kajian risiko bencana tanah longsor didasarkan pada komponen bencananya yakni indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa potensi risiko bencana tanah longsor mencakup 34 wilayah kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan 1 Kecamatan Cigombong memiliki kelas risiko tinggi, 32 kecamatan berada pada kelas risiko sedang dan 1 Kecamatan Ciseeng berada pada kelas risiko rendah. Kabupaten Bogor berada pada tingkat risiko tinggi untuk bencana tanah longsor. Tingkat risiko ini dipengaruhi oleh tingkat bahaya tanah longsor tinggi, kerentanan tinggi namun kapasitas Kabupaten Bogor yang belum optimal dalam menghadapi bencana tanah longsor.

1. Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor. Tujuan dari kajian bahaya tanah longsor adalah untuk menentukan potensi penyebaran dan ukuran bencana. Kajian bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang berpeluang mempengaruhi terjadinya longsor. Menentukan wilayah dan kelas bahaya berdasarkan pengelolaan yang dapat terkena dampak longsor di Kabupaten Bogor. bahwa 34 dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor terkena longsor dengan total luas potensi 88.458,64 hektar berkisar dari rendah sampai tinggi. Berdasarkan metode kelas bahaya, tanah longsor di Kabupaten Bogor termasuk kelas bahaya tinggi di daerah Babakan Madang, Cariu, Citeureup, Jasinga, Jonggol, Kelapa Nunggal, Nanggung, Sukajaya, Sukaraja dan Tamansari. Namun, ada juga yang memiliki potensi sedang, seperti Kecamatan Cigudeg,

Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Leuwiliang, Rumpin, Caringin, Megamendung, Cigombong, Cijeruk, Leuwisadeng, Ciawi, Tenjolaya.

2. Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

Kerentanan merupakan kondisi masyarakat tidak mampu dalam menghadapi ancaman terhadap suatu bencana. Kerentanan untuk bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor didapatkan dari potensi penduduk terpapar serta kelompok rentan dan potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanah longsor. Kelas kerugian bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari kombinasi kelas kerugian serta kelas kerusakan lingkungan. Total kerugian bencana tanah longsor sebesar 1.311.880 Juta rupiah. Kerugian fisik ialah sebesar 628.738 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 683.143 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan ialah rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak tanah longsor. Kelas kerusakan lingkungan Kabupaten Bogor dilihat dari kelas maksimum dari hasil seluruh wilayah yang terkena bencana tanah longsor. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor 16.275,62 Ha.

3. Kapasitas Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

Kapasitas setiap Kecamatan terpapar bahaya tanah longsor. Perhitungan data tersebut didasarkan pada hasil gabungan ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan masyarakat. Secara keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Bogor mempunyai kelas kapasitas sedang. Kelas kapasitas Kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata kapasitas seluruh Kecamatan yang terpapar bahaya tanah longsor di Kabupaten Bogor. Menurut data tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kapasitas daerah baik melalui masyarakat ataupun pemerintah sendiri untuk mengantisipasi kejadian bencana tanah longsor.

3.2 Faktor Penghambat Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

1. Luas Wilayah Kabupaten Bogor

Salah satu faktor penghambat dari pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor yaitu wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas. Akibat luas wilayah Kabupaten Bogor tersebut BPBD kesulitan menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor.

2. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi tentunya sangat dibutuhkan terutama SDM yang memiliki kualitas tinggi, apabila SDM nya rendah tentunya akan menjadi kekurangan dan masalah dalam mengelola organisasi tersebut. Sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Bogor sendiri tergolong masih rendah sehingga dalam kegiatan pengurangan risiko bencana tanah longsor juga ikut rendah, karena berhasil tidaknya suatu kegiatan tergantung dari SDM nya itu sendiri. Ketika terjadi bencana yang datangnya bersamaan, pihak BPBD kewalahan karena SDM yang dibutuhkan tidak sesuai dengan apa yang

dibutuhkan ketika bencana terjadi, maka dari itu perlu dilakukannya penambahan SDM yang memiliki keahlian tentang bencana.

3. Banyaknya Bangunan Di Pemukiman Rawan Longsor

Banyaknya bangunan yang dibangun di kawasan rawan longsor dan masih banyak bangunan yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Karena struktur tanah yang tidak stabil, seharusnya rumah dibangun mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Akibatnya Kabupaten Bogor menjadi kawasan rawan terjadinya tanah longsor.

3.3 Strategi Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bogor

1. Kekuatan (*Strength*)

a. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Bogor

BPBD setiap tahunnya telah mengatur dan mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan yang ada sehingga setiap kegiatan berjalan dengan baik. Anggaran pun telah direncanakan dengan baik sehingga terbilang tidak ada kekurangan dalam hal pendanaan.

b. Sistem kerja yang baik

Sistem kerja antar masing-masing bidang sudah baik maka tujuan yang akan dicapai pun bisa terlaksana dengan baik juga. Dan kerja sama dengan masyarakat khususnya dengan instansi yang sudah dibentuk pun terjalin dengan sangat baik.

c. Sarana dan Prasarana yang baik

Sarana dan Prasarana sudah cukup lengkap dan memadai untuk penanganan bencana, mulai dari untuk bidang administrasi hingga bidang penanggulangan bencana di lapangan seperti alat berat, truk dan sebagainya. Hanya SDM untuk mengoperasikannya yang kurang.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam BPBD Kabupaten Bogor kurang dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas dari pegawai BPBD Kabupaten Bogor tidak cukup untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bogor, selain itu kualitas dari pegawai juga kurang memadai.

b. Kurang Lengkapnya Dokumen Kajian Bencana

Dokumen dalam BPBD Kabupaten Bogor masih belum lengkap dikarenakan kapasitas dari sumber manusia itu sendiri yang kurang serta masih banyak data-data yang belum masuk untuk nantinya diolah oleh BPBD.

3. Peluang (*Opportunities*)

a. Adanya Regulasi Penanganan Bencana

Regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor berperan cukup penting dalam mitigasi bencana tanah longsor, Karena BPBD sendiri rujukannya atau berpatokan terhadap regulasi penanggulangan bencana yang ada di daerah. Dan BPBD juga berlindung terhadap regulasi penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Bogor.

b. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan khususnya tanah longsor

Terdapat peluang besar untuk memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Teknologi ini diharapkan mampu menunjang dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana tanah longsor. Pemanfaatannya dapat berbentuk pembuatan aplikasi pengaduan atau sebagainya.

c. Adanya Kerja sama antar OPD serta Pihak Swasta

Dukungan dari OPD serta pihak swasta tentunya sangat menjadi peluang bagi BPBD terutama dalam hal mitigasi bencana. Dengan adanya dukungan dari OPD dan pihak swasta, BPBD juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena masalah kebencanaan merupakan tugas utama dari BPBD.

4. Ancaman (*Threats*)

a. Kondisi Alam dan Sosial Kabupaten Bogor

Terdapat faktor dari alam maupun dari diri masyarakat yang memicu terjadinya bencana tanah longsor. Faktor yang disebabkan oleh manusia yaitu dengan banyaknya dan meningkatnya jumlah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Banyak alih fungsi pembangunan yang tidak memperhatikan area rawan bencana tanah longsor yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Bogor. Adapun faktor alam yang memicu bencana tanah longsor yaitu terjadinya perubahan iklim global yang tidak menentu sehingga sering terjadinya cuaca ekstrim dan sulit diprediksi seperti hujan deras yang sering terjadi sehingga dapat menyebabkan tanah longsor.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Kurangnya kesadaran masyarakat iya menjadi ancaman dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah sendiri perlu mengadakan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan. Karena orang yang selamat dari bencana dan paling besar presentasinya itu berasal dari diri sendiri untuk menyelamatkannya. Untuk relawan hanya sekian persen yang selamat karena relawan, oleh karena itu setiap masyarakat perlu dibekali tentang penyelamatan dan evakuasi apabila terjadinya bencana agar mereka mengetahui bagaimana cara menghindari dari bencana.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor harus tepat. Setelah mengetahui kekuatan dan peluang maka harus juga mengetahui kelemahan dan ancaman yang ada. Setelah mengetahui keempatnya BPBD harus mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi kekurangan dan ancaman sehingga terwujudnya strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor yang optimal. Berdasarkan matriks analisis SWOT diatas, maka diperoleh strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Strategi SO (*Strenght dan Opportunities*)

- Memaksimalkan pemasangan *Early Warning System*.
- Mempertahankan sistem kerja yang sudah berjalan agar kualitasnya tidak menurun.
- Menjaga kestabilan menggunakan sarana dan prasarana agar tetap terpelihara.

2. Strategi WO (*Weakness dan Opportunities*)

- Kerja sama dengan mitra kerja yang berkompeten dalam penyusunan dokumen terkait mitigasi bencana
- Adanya evaluasi secara berkala tentang program yang sedang dijalankan

3. Strategi ST (*Strenght dan Threats*)

- Dengan adanya dukungan dana, BPBD memberikan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
- Untuk menjaga kestabilan tanah perlu adanya perbaikan lahan dengan cara menanam tanaman seperti tanaman vertifer atau dibuatnya terasering.

4. Strategi WT (*Weakness dan Threats*)

- Pemberian pendidikan dan pengetahuan berupa penyuluhan dampak bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

3.4 Diskusi Utama Temuan Penelitian

Dengan adanya pengurangan risiko bencana tanah longsor memberikan dampak positif diberbagai lapisan masyarakat Kabupaten Bogor dalam rangka memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Bogor tentang bagaimana cara mitigasi bencana yang baik dan benar yang berguna untuk mengurangi dampak besar akibat terjadinya bencana. Temuan yang peneliti dapatkan yaitu kurang sadarnya masyarakat terhadap penanggulangan bencana tanah longsor yang menjadi ancaman dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor khususnya mengenai pola perilaku

masyarakat yang masih mendirikan bangunan di kawasan rawan longsor. Sama dengan halnya penelitian Juhadi, Wahyu Setyaningsih, Nia Kurniasari (2016) bahwa kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana termasuk kurang, karena perilaku masyarakat sebagian besar belum sesuai upaya mitigasi bencana. Hal tersebut, disebabkan kepentingan ekonomi masyarakat (pemenuhan kebutuhan masyarakat) dan tidak adanya kebijakan pemerintah yang mengatur pelaksanaan mitigasi bencana. Maka yang terjadi, masyarakat hanya melakukan tindakan sesuai keinginan dan keyakinan mereka.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor yaitu wilayah Kabupaten Bogor yang luas, terbatasnya sumber daya aparatur serta masih banyak pihak asing yang membangun bangunan tidak sesuai dengan aturan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait Strategi Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023 maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi BPBD dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor sudah baik. Hal ini didukung oleh dana APBD Kabupaten Bogor, sistem kerja yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai. Faktor yang menjadi penghambat dari upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor adalah wilayah Kabupaten Bogor yang luas, terbatasnya sumber daya aparatur dan masih banyak pihak asing yang membangun bangunan tidak sesuai dengan aturan. Kajian risiko bencana tanah longsor didasarkan pada komponen bencananya yakni indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa potensi risiko bencana tanah longsor mencakup 34 wilayah kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan 1 Kecamatan Cigombong memiliki kelas risiko tinggi, 32 kecamatan berada pada kelas risiko sedang dan 1 Kecamatan Ciseeng berada pada kelas risiko rendah. Kabupaten Bogor berada pada tingkat risiko tinggi untuk bencana tanah longsor. Tingkat risiko ini dipengaruhi oleh tingkat bahaya tanah longsor tinggi, kerentanan tinggi namun kapasitas Kabupaten Bogor yang belum optimal dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian, tenaga dan kemampuan peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan

penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Mempertahankan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* yang berkompeten dalam pengadaan dokumen kelengkapan risiko bencana.
2. Mengadakan pelatihan agar dapat diaplikasikan oleh pegawai BPBD dalam pengembangan pengurangan risiko bencana. Hal ini diharapkan agar pegawai BPBD juga memiliki kompetensi dan kualitas yang baik.
3. Menambah Pegawai baik Aparatur Sipil Negara ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan pendidikan minimal Sarjana 1/ Diploma 3 diutamakan yang mengambil jurusan teknik lingkungan, ilmu komunikasi, teknik geologi dan geodasi, serta jurusan lain yang berhubungan dengan kebencanaan.
4. Diberikannya sanksi yang tegas bagi oknum-oknum yang membangun tidak sesuai dengan aturan. Sanksi menurut UU tentang Penataan Ruang berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Filza, R. (2022). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mengantisipasi Bencana Alam Hidrometeorologi Di Kota Tasikmalaya*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Imam, U. (2018). *Zona Potensi Kerawanan Longsor Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor*. Diss. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Isnaini, R. (2019). *Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah*. Islamic Management and Empowerment Journal Vol. 1 No. 2, 143-160.
- Rahim, Abd Rahman dan Enny Radjab. 2017. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahman, A. Z. (2015). *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik.

Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Supriyono, P. (2014). *Seri Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor*. Yogyakarta: ANDI



